BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian pada strategi pemerintah Indonesia terkait penerapan ASEAN-*China Free Trade Area* (ACFTA). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang diambil oleh Indonesia dalam menghadapi China pasca penerapan ACFTA. Adapun studi kasus yang diteliti yaitu sektor Industri dan Produk tekstil (TPT) di Indonesia dari tahun 2010 - 2013.

3.1.1 ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA)

ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif aupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi,sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Blok perdagangan ini telah menimbulkan berbagai prediksi model mimpi neoliberal dari keajaiban pertumbuhan Asia hingga bentuk idealis dari model *regionalism* atau bentuk *alternative* perdagangan selatan - selatan antara negara - negara berkembang (Bernardino, 2004 : 3)

ACFTA merupakan perjanjian yang paling cepat terbentuk dari seluruh negosiasi FTA yang dilakukan oleh China. Perdagangan bebas ASEAN-China akan menjadi kawasan perdagangan global terbesar ketiga setelah Uni Eropa dan NAFTA. Walau demikian, masih ada kekhawatiran apakah ACFTA yang beranggotakan negara-negara berkembang dengan struktur ekonomi akan berhasil dan efektif dalam mendorong integrasi ekonomi regional (Bernardino, 2004 : 5).

Kerjasama ASEAN-China *Free Trade Area* pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri China Zhu Rongji pada tahun 2000 dalam ASEAN+3 *Meeting* di Singapura pada November 2000 dan pada ASEAN-China *Economic Cooperation Meeting* pada Agustus 2001. Usulan perjanjian ini juga turut dikemukakan oleh pemerintah Singapura (Akbar, 2011 : 145).

Pada tahun 2001, China mengusulkan adanya perdagangan bebas antara ASEAN dan China dimana pada waktu itu China mengusulkan suatu kawasan perdagangan bebas dengan ASEAN dalam konsep ASEAN-China *Free Trade Area* yang ditargetkan akan terwujud pada tahun 2010 bagi ASEAN 6, dan tahun 2015 untuk negara *Cambodia,Myanmar, Laos, Vietnam* (CLMV) (Bernardino, 2004 : 1).

Dalam membentuk ACFTA , para kepala negara anggota ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para kepala negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002.

Protokol perubahan *Framewok Agreement* ditandatangani tanggal 6 Oktober 2003 di Indonesia,lebih tepatnya di Bali. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006 (http://aseansec.org/64/htm diakses pada 21 Maret 2014).

Setelah negosiasi tuntas,secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Persetujuan jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Philiphin pada bulan Januari 2007. Sedangkan persetujuan investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand (Akbar, 2011 : 27).

Secara lebih jelas, *road map* perjanjian ACFTA akan dijelaskan seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Roadmap Pembentukan ACFTA

Tanggal	Kegiatan	Tempat
Nov 2000	ACFTA pertama kali dikemukakan oleh PM China dalam ASEAN+3 *Meeting*	Singapura
6 Nov 2001	China dan anggota ASEAN memulai negosiasi pembentukan ACFTA	Brunei Darussalam
4 Nov 2002	Penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* antara ASEAN dan China	Phnom Penh, Kamboja
1 Jan 2004	Pelaksanaan *Early Harvest Program (EHP)*, penurunan tarif pada produk tertentu dalam jangka waktu 3 tahun dengan tarif 0 persen mulai 1 Januari 2006	
29 Nov 2004	KTT – 10 China-ASEAN. Penandatanganan *The China-ASEAN Protocol on Enchaned Dispute Settlement Mechanism (DSM) and The Agreement on Trade in Goods*	Vientiane,Laos
July 2005	Implementasi *Agreement on Trade in Goods under Framework Agreement on ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation*	
Jan 2007	KTT-12 China-ASEAN. Penandatangan *Agreement on Trade in Service between China and ASEAN*	Cebu, Filiphina
15 Agust 2007	Penandatangan *The Investment Agreement ASEAN – China*	Bangkok – Thailand
1 Jan 2010	Implementasi penuh ACFTA	

Sumber: Diolah Peneliti

Pembentukan perdagangan bebas ASEAN-China yang tertuang dalam isi pembukaan dan kesepakatan ACFTA menyiratkan beberapa faktor penyebab terjadinya kesepakatan ACFTA, yaitu :

a. Adanya hambatan-hambatan ekonomi antar negara dan berkeinginan memperdalam hubungan ekonomi diantara para pihak
b. Berkeinginan untuk mendapatkan biaya-biaya yang lebih rendah

c. Meningkatkan perdaangan dan investasi intraregional
d. Meningkatkan efesiensi ekonomi
e. Menciptakan suatu pasar yang besar dengankesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha dari para pihak
f. Meningkatkan daya tarik para pihak dalam modal dan kemampuan (Departemen Luar Negeri, 2003 : 6).

3.1.1.1 Tujuan dan Kesepakatan Dalam ACFTA

Adapun tujuan dari kerjasama perdagangan bebas regional ASEAN-China ini yaitu :

a. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi,perdagangan,dan investasi antara negara-negara anggota
b. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi
c. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara Negara-negara anggota
d. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam – CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara Negara-negara anggota (Departemen Luar Negeri, 2003 : 1).

Untuk mencapai tujuan dari kesepakatan ACFTA, negara anggota menyepakati langkah-langkah kerjasama yang dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun. Langkah-langkah tersebut adalah:

a. Penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tarif dan non-tarif dalam semua perdagangan barang-barang
b. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan
c. Pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China
d. Ketentuan pemberlakuan khusus dan berbeda serta flexibilitas untuk negara negara anggota ASEAN baru
e. Ketentuan fleksibilitas bagi Para Pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sektor-sektor barang, jasa dan investasi dimana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan
f. Pembentukan langkah-langkah *fasilitasi perdagangan dan investasi* yang efektif, termasuk, tapi tidak terbatas pada, *penyederhanaan prosedur kepabeanan* dan *pengembangan* pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan
g. *Perluasan kerjasama ekonomi* dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama diantara para Pihak yang akan melengkapi

pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para Pihak dan perumusan rencana-rencana aksi dan program-program dalam rangka mengimplementasikan kerjasama dari sektor-sektor/bidang-bidang yang telah disepakati

h. *Pembentukan mekanisme yang tepat* untuk maksud efektifitas bagi implementasi Persetujuan ini (Departemen Luar Negeri, 2003 : 2-3).

Dalam kesepakatan ini semua sektor turut berperan termasuk sektor bisnis. Setiap negara membutuhkan promosi dan fasilitas atas kerjasama mereka lebih jauh dan menggunakan kesempatan-kesempatan bisnis yang lebih besar berdasarkan apa yang disepakati dalam ACFTA. Tidak bisa dipungkiri, flexibilitas mutlak diperlukan mengingat tingkat pembangunan ekonomi khususnya anggota baru ASEAN berbeda-beda.

Sesuai kesepakatan yang dicapai pada ASEAN-China Sumit yang diselenggarakan di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam pada 6 November 2001, ACFTA sudah terbentuk dalam waktu 10 tahun. Atas dasar itulah, ACFTA mulai berlaku per 1 Januari 2010.

Pemerintah Indonesia mengesahkan Framework Agreement melalui Keppres No. 48 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic Of China* (Persetujuan Kerangka Kerjasama Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China),

pada 15 Juni 2004. Inilah dasar hukum dari pemberlakuan ACFTA di Indonesia. Pengesahan Framework Agreement itu sendiri disahkan melalui KEPPRES No.48 *tahun 2004* sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b04bef2aa8ee/dasar-hukum-pemberlakuan-acfta diakses pada 2 Februari 2014).

3.1.1.2 Tahapan Penurunan dan Penghapusan Tarif Dalam ACFTA

Penurunan dan penghapusan tarif tidaklah diterapkan begitusaja, tetapi melalui sebuah tahapan-tahapan yang diimplementasikan sedikit demi sedikit. Proses Penurunan atau penghapusan tarif bea masuk dilakukan dengan pendekatan bilateral, dimana setiap negara menjadwalkan penurunan atau penghapusan tarif dalam menyusun produknya masing-masing. Ada tiga tahapan pelaksanaan program penurunan dan penghapusan tarif bea masuk, yaitu:

1. *Early Harvest Program (EHP)*

   The Early Harvest Program (EHP) bertujuan mempercepat implementasi penurunan tarif produk dimana program penurunan tarif bea masuk ini dilakukan secara bertahap dan secara efektif dimulai pada Januari 2006. EHP memfokuskan pada hasil pertanian baik produk segar maupun hasil olahan kecuali produk sepesifik dari anggota perjanjian.

2. *Normal Track*

Tahap ini memulai penurunan tarif bea masuk pada 20 Juli 2005 sekitar 20% dan akan terus secara bertahap berkurang menjadi 0% pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan tahun 2015 untuk CMLV.

3. *Sensitive Track*

Tahapan perdagangan barang yang akan dilakukan penurunan tarif mulai tahun 2012, dengan penjadwalan bahwa maksimum tarif bea masuk pada tahun 2012 adalah 20% dan dilanjutkan dengan penghapusan bertahap yang akan menjadi 0-5% mulai tahun 2018. Produk produk Indonesia yang masuk dalam kategori tersebut antara lain: kerajinan kulit, kacamata, alat musik tiup, alat musik petik, alat olah raga, besi dan baja, suku cadang, alat angkut, senyawa organic, antibiotic, kaca, barang-barang plastik (http://www.ditjenkpi.kemendag.go.id diakses pada 24 Maret 2014).

Produk- produk Highly Sensitive akan dilakukan penurunan tarif bea masuk pada tahun 2015 dengan maximum tarifsebesar 50%. Produk-produk Indonesia yang masuk kategori ini antara lain beras, gula, jagung, jedelai, produk otomotif dan produk ceramik (http://www.bsn.go,id/files.../128/46 diakses pada 7 April 2014).

Dalam kerangka *Agreement* ASEAN-China *Comprehensive Economic cooperation*, China mengurangi tarif impor bagi produk ASEAN beberapa tahun sebelum negara-negara ASEAN memberlakukan hal yang sama dan membuka pasar mereka bagi produk ekspor China. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ASEAN keuntungan ekspor terhadap produk China dan memberikan kesempatan

bagi produsen ASEAN agar lebih efisien dan produktif serta berharap China dapat menjadi importer utama bagi produk-produk ASEAN (Akbar, 2011 : 146).

3.1.1.3 Dinamika Hubungan Ekonomi ASEAN-China

Saw Swee-Hock, Shen Lijun dan Chin Kin Wah dalam buku *"An over view of ASEAN-China Relation"* menjelaskan, kebangkitan China dalam bidang ekonomi sepanjang dekade 1990-an menimbulkan macam-macam anggapan di kalangan ASEAN. Walaupun secara ekonomi China menjadi semakin menantang,pada saat yang sama China juga muncul sebagai ancaman bagi ASEAN . Begitupun dengan ASEAN dimata China.

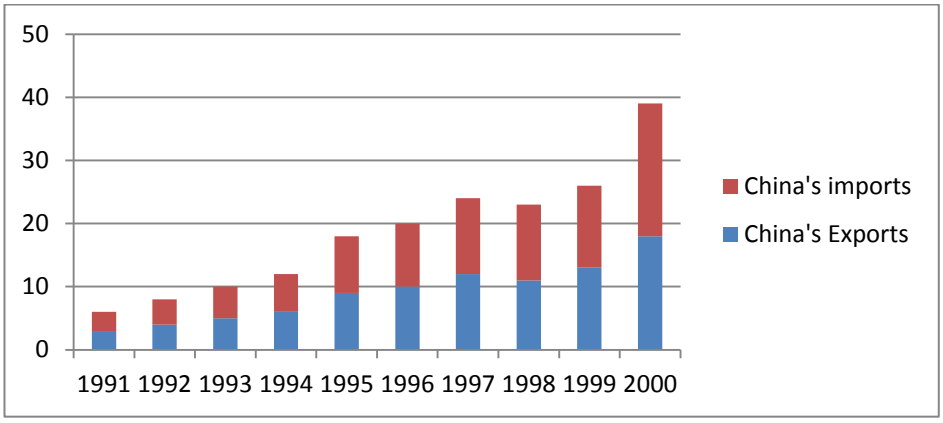
Sebelum memasuki tahun 90an, dapat dikatakan belum tercipta hubungan resmi antara ASEAN sebagai sebuah kelompok negara dengan China walaupun memiliki hubungan resmi dengan beberapa negara dalam ASEAN secara bilateral yang berbentuk hubungan diplomatik. Pada Juli 1991 Menteri Luar negeri China *Qian Qichen* menghadiri pembukaan *ASEAN Ministerial Meeting* ke 24. China memanfaatkan moment ini untuk menyampaikan niatnya bekerjasana dengan ASEAN yang kemudian ditanggapi positif oleh ASEAN. Juli 1996 China akhirnya mendapatkan status penuh sebagai mitra dialog. Walaupun ASEAN menerima China sebagai Mitra dialog, bukan berarti bahwa tak ada masalah dalam hubungan tersebut. China memiliki konflik-konflik dengan beberapa negara ASEAN seperti dengan Vietnam (dalam konflik kepulauan Spartly), Philiphina (konflik kepulauan Mischief), Malaysia dan Singapura (dalam klaim perbatasan wilayah Myanmar). Akan tetapi, ASEAN tetap konsisten untuk mengembangkan kerjasama dengan China dengan mempertimbangkan posisi

strategis pasarnya yang sedemikian besar. China juga mulai terlibat dalam pembentukan ASEAN+3 pada tahun 1997 (Cipto, 2007 : 169).

Krisis Asia 1997 dapat dikatakan sebagai *turning point* yang semakin mengakrabkan ASEAN dan China setelah kekuasaan barat benar-benar tidak bersahabat dengan negara di kawasan Asia Tenggara pada saat itu. China muncul bak pahlawan ketika negara-negara Asia Tenggara membutuhkan bantuan ekonomi pasca krisis finansial tersebut (Lijun, 2003 : 1).

Perdagangan ASEAN dan China terus meningkat dengan cepat pasca hubungan formal terjalin antara ASEAN dan China pada tahun 1991. Dengan jumlah sedemikian rupa, ASEAN telah menjadi mitra dagang kelima terbesar China, dan China merupakan mitra dagang terbesar ASEAN keenam (Lijun, 2003 : 3).

Hubungan Bilateral ekonomi antara ASEAN dan China terus meningkat pada abad 21 terutama sejak tahun 2000. Pasca masuknya China ke dalam WTO menjadi dilemma tersendiri bagi ASEAN. Menarik melihat pasar China yang besar, tentu menjadi peluang bagi ASEAN untuk dapat memperluas jaringan ekspor mereka. Namun di sisi lain produk China yang tidak bersifat komplementer tentu menjadi saingan yang cukup tangguh dalam kawasan ekspor ASEAN.



Sumber : Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation

Gambar 3.1
Grafik ASEAN-China Trade 1991-2000 (U$ Millions)

China akhirnya melancarkan strategi terhadap ASEAN dengan proposal mengenai perdagangan bebas ASEAN-China di abad 21 melalui sebuah ide yang dikemukakan oleh Perdana Menteri China Zhu Rongji pada tahun 2000 dan pada pertemuan kepala negara ASEAN dan China di Brunei tahun 2001 ide tersebut menjadi sebuah proposal. Pertemuan puncak ASEAN-China akhirnya berlangsung dalam Pertemuan Puncak ASEAN 2003. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi ASEAN-China. Kesepakatan ini merupakan persiapan penuh untuk menjalani ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) (Yang, 2004 : 7).

3.1.2 Strategi Indonesia Hadapi ACFTA

Banyak kajian yang membahas tentang peluang dan hambatan bagi Indonesia dalam menghadapi ACFTA. Masa adaptasi Indonesia menghadapi ACFTA sudah dimulai dari tahun 2005 dimana produk-produk China yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan tarif sebesar 5% begitu juga sebaliknya.

Pemerintaah Indonesia sendiri menilai ada 3 peluang yang akan diraih dalam ACFTA , antara lain:

1. Penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan non tarif serta hambatan non-tarif di China membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan ke China.
2. Penciptaan rezim investasi yang kompetitif dan terbuka membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari China.
3. Peningkatan kerjasama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas membantu Indonesia melakukan peningkatan pembangunan kapasitas, transfer teknologi, dan kapabilitas manajerial (Hafidh, 2011: 9).

Peluang tersebut tentu akan optimal jika didukung dengan strategi dan kebijakan yang tepat oleh pemerintah Indonesia. Stategi untuk menghadapi China ini melibatkan seluruh lembaga lembaga pemerintah yang terkait seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, serta lembaga lembaga non-pemerintah seperti Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan juga para pelaku industri tekstil dan produk tekstil Indonesia.

Sebenarnya masih cukup banyak kelemahan Indonesia secara internal dalam menghadapi ACFTA seperti kualitas teknologi dan SDM yang kurang memadai, tingginya suku bunga perbankan, dan juga dis-organisasi struktur dan akhirnya menyebabkan daya saing Indonesia terlebih di bidang industri tekstil menurun. Dengan kata lain, suatu negara akan mampu bersaing ketika negara tersebut

membatasi masuknya produk asing dengan cara berusaha memenuhi kebutuhan dalam negrinya sedniri seperti dalam hal bahan baku.

Peluang utama Indonesia sendiri sebenaranya ada di dalam tahap awal yaitu *Early Harvest Program* yang mendukung ekspor pertanian Indonesia ke China. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada tahun 2004 baru menjabat sangat mendukung adanya ACFTA ini. Pemerintah Indonesia optimis akan meraih hasil positif dari keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA. Presiden SBY turut pula didukung oleh Menteri Perdagangan pada saat itu Dr. Mari Elka Pangestu. Beliau menilai implementasi ACFTA akan memperkuat perdagangan bilateral serta investasi antar kawasan dan memperkuat *strategic partnership* antara Indonesia dan China (Lim, 2010 : 3).

Indonesia juga memiliki tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam jangka menengah,focus pembangunan industri adalah penguatan dan penumbuhan kluster-kluster industri inti, yaitu industri makanan dan minuman, industri pengolahan hasil laut, industri tekstil dan produk tekstil, industri alak kaki, industri kelapa sawit, industri barang kayu, industri karet, industri pulp dan kertas, industri mesin listrik, dan industri petrokimia. Pengembangan kesepuluh kluster industri ini dilakukan secara komprehensif dan integratif, yang didukung secara simultan dengan pengembangan industri terkait dan industri penunjang (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=29 diakses pada 27 April 2014).

Beberapa strategi awal telah dipersiapkan oleh Indonesia dalam menghadapi China dalam ACFTA, diantaranya :

1. Meningkatkan efektifitas pengamanan pasar dalam negeri dari penyelundupan dan pengawasan peredaran barang dalam negeri seperti melalui peningkatan standar mutu, HaKI dan perlindungan konsumen, serta pencegahan dumping dan lain-lain sesuai dengan disiplin perjanjian internasional .
2. Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap penerbitan dan pemanfaatan dokumen surat keterangan asal (SKA) untuk ekspor dan impor
3. Melakukan penguatan pasar ekspor,seperti pusat promosi perdagangan.
4. Peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri
5. Penanganan isu domestik lainnya, seperti pembenahan tata ruang dan pemanfaatan lahan, infrakstruktur dan energi, perbaikan pelayanan publik, dan lain-lain (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=29 diakses pada 27 April 2014).

Sebenarnya strategi ini cukup sangat sederhana dan normatif, namun dalam kenyataannya point-point tersebut masih belum terlaksana dengan baik. Faktanya masih banyak barang barang selundupan yang masuk yang bebas dari pengawasan maupun yang sengaja tidak diawasi oleh pihak-pihak bea cukai.

Dalam rangka mengantisipasi dampak implementasi ACFTA terhadap perekonomian nasional, pemerintah memiliki strategi yang secara umum telah merumuskan dan menerapkan sepuluh kebijakan, yaitu:

1. Mengevaluasi dan merevisi semua Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah kadaluwarsa dan menerapkannya secara wajib dengan terlebih dahulu menotifikasikan ke WTO.
2. Mengefektifkan fungsi Komite Anti Dumping dan Menangani setiap kasus dugaan praktek dumping dan pemberian subsidi secara langsung oleh negara mitra dagang.
3. Mengefektifkan fungsi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dalam menanggulangi lonjakan barang impor di pasar dalam negeri.
4. Meningkatkan lobi pemerintah untuk mengamankan ekspor Indonesia antara lain dari ancaman dumping dan subsidi oleh negara mitra dagang.
5. Mengakselerasi penerapan dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Ekonomi.
6. Melakukan harmonisasi tarif bea masuk (BM) pos tarif untuk produk hulu dan hilir, sehingga diharapkan akan memacu investasi dan daya saing.
7. Mengefektifkan tugas dan fungsi aparat kepabeanan, termasuk mengkaji kemungkinan penerapan jalur merah bagi produk yang rawan penyelundupan produk ilegal.

8. Membatasi/melarang ekspor bahan baku mentah untuk mencukupi kebutuhan energi bagi industri dalam negeri sehingga dapat mendorong tumbuhnya industri pengolahan ditingkat hulu sekaligus memperkuat daya saing industri lokal.
9. Mempertajam kebijakan tentang fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu.
10. Melanjutkan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan No 56 Tahun 2008 yang mengatur pembatasan pintu masuk pelabuhan untuk lima produk tertentu yaitu alas kaki, barang elektronik, mainan anak-anak, tekstil dan garmen, serta makanan dan minuman (BSN, 2010 : 13).

Strategi yang dirumuskan pemerintah Indonesia cukup terlihat matang, tapi dalam implementasinya masih terbilang kurang. Indonesia masih terbentur kendala- kendala infrakstruktur, terbatasnya sumber energi yang tentu akan memperlambat dan membuat cost-produksi menjadi tinggi sehingga membuat harga produk menjadi mahal. Sosialisasi Indonesia menghadapi ACFTA juga terbilang kurang, sehingga para pelaku industri yang terkena dampak ACFTA juga merasa belum siap ketika negara ASEAN lain dan China mulai bersaing dengan produk lokal dalam negeri.

3.1.2.1 Dinamika Hubungan Ekonomi Indonesia-China

Hubungan diplomatik Indonesia dan China dimulai pada tahun 1950, sedangkan hubungan bilateral perdagangan Indonesia-China ditandatangani

pertama kali pada tahun 1953. Diawal kerjasama, perdagangan kedua negara hanya mencapai US$ 7,4 Juta dan terus meningkat hingga US$129 Juta dalam waktu lima tahun (Muas, 2009:26). Namun terjadi pembekuan hubungan diplomatik saat isu komunisme China turut membantu pertumbuhan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1967. Tetapi perdagangan antara Indonesia dan China masih tetap terjadi secara tidak langsung melalui jaringan Hongkong dan Singapura yang bernilai hingga US$ 200 Juta pertahun (www.city.edu.hk/search/CSEA.../CSEA.../Lin diakses pada 25 April 2014).

Normalisasi terwujud ketika dimana Presiden Soeharto menginginkan perluasan pasar ekspor nonmigas Indonesia termasuk ke China dan keinginan Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai ketua Gerakan Non-Blok (Hadi, 2009:54). Tahun 1990 PM China Li Peng mengunjungi Indonesia berkaitan dengan Kesepakatan Penyelesaian Hutang Indonesia ke China (*Agreement on the Settlement of Indonesia's Debt Obligation to China)* yang kemudian dilajutkan dengan naskah persetujuan hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan China (Huda, 2009 : 187).

China dengan kebijakan yang lebih terbuka dalam perdagangan disertai pula dengan peningkatan industri yang pesat, terlihat dari komoditas ekspor China yang dapat berkompetensi dengan produk yang sama dari negara – negara lain dalam pasar domestik Indonesia dimana China mampu mengakomodasikan kebutuhan dan memenuhi permintaan dari berbagai kalangan konsumen Indonesia.

Berkaitan dengan kegiatan perdagangan China, produk-produk dari China memang dikatakan relatif memiliki harga jual yang lebih murah dibandingkan dengan negara-negara ekonomi besar lainnya seperti Jepang, dan Amerika Serikat. Selain itu, jumlah penduduk yang banyak, sekitar 1.4 milyar jiwa dan dengan daerah yang luas yang dimiliki oleh China menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan industri dan perdagangan suatu negara untuk menjalin kerjasama (Muas, 2009 : 33).

Memasuki tahun 2000 China resmi menjadi partner dagang kelima terbesar Indonesia dan Indonesia berada pada urutan ketujuh belas partner dagang China. Ekspor Impor antara Indonesia dan China terus berjalan semakin baik seiring dibukanya pembahasan perdagangan bebas antara ASEAN dan China yang dicetuskan oleh China pada tahun 2000.

Sejak adanya kesepakatan perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan China (ACFTA) yang diratifikasi oleh ASEAN pada 2002 dan di Indonesia pada tahun 2004, ACFTA membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dengan China semakin meningkat dan terus berkembang. Sejak diratifikasi dan diimplementasikannya ACFTA di Indonesia, hubungan perdagangan antara keduanya. Perkembangan neraca perdagangan Indonesia China dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.2

Perdagangan Indonesia-China 1990-2009 (Ribu USD)

Tahun	Total Perdagangan	Ekspor	Impor
1990	1.486.729	834.385,8	652.343,4
1995	3.236.941	1.741.718	1.495.223
2000	4.789.679	2.767.708	2.021.971
2005	12.505.216	6.662.354	5.842.863
2009	20.074.672	9.055.010	11.019.662
Pertumbuhan(%)			
1990-1995	16,8	15,9	18,0
1995-2000	8,2	9,7	6,2
2000-2005	21,2	19,2	23,6
2005-2009	12,6	7,9	17,1

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia

Sampai satu tahun sebelum ACFTA benar benar direalisasikan, terjadi peningkatan jumlah Impor produk China yang masuk ke Indonesia dibandingkan Ekspor produk Indonesia ke China. Hal ini disebabkan oleh tahapan penurunan tarif dalam skema ACFTA yang menjadikan tarif masuk menjadi 5%. Pada tahun pertama ACFTA direalisasikan, baik impor dan ekspor antara Indonesia dan China mengalami lonjakan. Hal ini dikarenakan penghapusan hambatan tarif secara penuh yaitu 0%.

Tabel 3.3

Perdagangan Indonesia-China 2010-2013 (Ribu USD)

Tahun	Impor	Ekspor
2010	19.688,0	20.019,1
2011	25.456.4	24.728,0
2012	28.962,0	28.428,0
2013	22.191,5	20.092,0

Sumber : http://www.bps.go.id/exim-frame.php?kat=2 diakses pada 26 April 2014

Dari tabel tersebut dapat terlihat jumlah impor produk China ke Indonesia berada diatas ekspor produk Indonesia ke China. Berbeda dengan saat ACFTA belum direalisasikan secara penuh, saat itu jumlah ekspor produk Indonesia ke China masih berada diatas jumlah impor produk China ke Indonesia.

3.1.3 Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia

Sejarah pertekstilan Indonesia dapat dikatakan berawal dari sub-sektor pertenunan (*weaving*) dan perajutan (*knitting*) dengan menggunakan alat *Textile Inrichting* Bandung (TIB) *Gethouw* atau yang lebih dikenal dengan anam Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang diciptakan oleh Daalennoord pada tahun 1926 dengan produknya berupa tekstil tradisional, seperti sarung, kain panjang, lurik, stagen (sabuk), dan selendang. Penggunaan ATBM mulai tergeser oleh Alat Tenun Mesin (ATM) yang pertama kali digunakan pada tahun 1939 di Majalaya, Jawa Barat, dimana di daerah tersebut mendapat pasokan listrik pada tahun 1935. Sejak itu industri Tekstil dan produk tekstil di Indonesia mulai memasuk era teknologi dengan menggunakan ATM (Andara, 2012 : 23).

Tahun 1960-an, sesuai dengan iklim ekonomi terpimpin, pemerintah

Indonesia membentuk Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) yang antara lain seperti OPS Tenun Mesin, OPS Tenun Tangan, OPS Perajutan, OPS Batik, dan lain sebagainya yang dikoordinir oleh Gabungan Perusahaan Sejenis (GPS) Tekstil dimana pengurus GPS Tekstil tersebut ditetapkan dan diangkat oleh Menteri Perindustrian Rakyat dengan perkembangannya sebagai berikut:

1. Perkembangan tahun 1965-an, OPS dan GPS dilebur menjadi satu dengan nama OPS Tekstil dengan beberapa bagian menurut jenisnya atau sub- sektornya, yaitu pemintalan (*spinning*), pertenunan (*weaving*), perajutan (*knitting*) dan penyempurnaan (*finishing*).
2. Menjelang tahun 1970, berdirilah berbagai organisasi seperti Perteksi, *Printer's Club* (kemudian menjadi *Textile Club*), perusahaan milik pemerintah (Industri Sandang, Pinda Sandang Jabar, Pinda Sandang Jateng, Pinda Sandang Jatim), dan Koperasi (GKBI, Inkopteksi).
3. Tanggal 17 Juni 1974, organisasi-organisasi tersebut melaksanakan Kongres yang hasilnya menyepakati mendirikan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan sekaligus menjadi anggota API (Andara, 2012:24).

Fase perkembangan Industri Tekstil di Indonesia diawali pada tahun 1970-an, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia mulai berkembang dengan masuknya investasi dari Jepang di sub-sektor industri hulu (*spinning* dan *man-*

made fiber making).

Adapun fase perkembangan industri dan produk tekstil di Indonesia sebelum ACFTA diberlakukan seperti sebagai berikut:

1. Periode 1970 - 1985, industri tekstil Indonesia tumbuh lamban serta terbatas dan hanya mampu memenuhi pasar domestik (substitusi impor) dengan segmen pasar menengah kebawah.
2. Tahun 1986, industri TPT Indonesia mulai tumbuh pesat dengan faktor utamanya adalah (1) iklim usaha kondusif, seperti regulasi pemerintah yang efektif yang difokuskan pada ekspor non-migas (2) industrinya mampu memenuhi standar kualitas tinggi untuk memasuki ekspor di segmen pasar atas *fashion.*
3. Periode 1986 - 1997 kinerja ekspor industri TPT Indonesia terus meningkat dan membuktikan sebagai industri yang strategis dan sekaligus sebagai andalan penghasil devisa negara sektor non-migas. Pada periode ini pakaian jadi sebagai komoditi primadona.
4. Periode 1998 - 2002 merupakan masa paling sulit. Kinerja ekspor tekstil nasional fluktuatif. Pada periode ini dapat dikatakan periode *cheos, rescue,* dan *survival*.
5. Periode 2003 - 2006 merupakan *outstanding rehabilitation, normalization,* dan *expansion.* Upaya revitalisasi stagnan yang disebabkan multi-kendala, yang antara lain dan merupakan yang utama (1) sulitnya sumber pembiayaan, (2) iklim usaha yang tidak kondusif.
6. Periode 2007 – 2010 ialah periode dimana industri dan produk tekstil

rumahan yang terjual di pasaran domestik, walaupun produk tekstil China masih lebih mendominasi karena harga yang berada jauh dibawah produk lokal (Hartono, 2012 : 27).

3.1.3.1 Pengelompokan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia

Secara umum, tekstil adalah bahan pakaian atau kain. Tekstil dapat digunakan sebagai pakaian dan juga kebutuhan lain untuk rumah tangga, industri, dan kegunaan lainnya seperti gorden, tas, koper, taplak meja, jok mobil, selang untuk minyak dan pemadam kebakaran,dan lainnya.

Industri TPT Indonesia secara teknis dan struktur terbagi dalam tiga sektor industri yang lengkap, vertikal, dan terintegrasi dari hulu ke hilir (Handriani, 2010), yaitu:

1. Sektor Industi Hulu (*upstream*), adalah industri yang memproduksi serat/fiber (*natural fiber* dan *man-made fiber* atau *synthetic*) dan proses pemintalan (*spinning*) menjadi produk benang (*unblended* dan *blended yarn*). Industrinya bersifat padat modal, *full automatic*, berskala besar, jumlah tenaga kerja relatif kecil dan *output* pertenagakerjaannya besar.
2. Sektor Industri Menengah (*midstream*), meliputi proses penganyaman (*interlacing*) benang menjadi kain mentah lembaran (*grey fabric*) melalui proses pertenunan (*weaving*) dan rajut (*knitting*) yang kemudian diolah lebih lanjut melalui proses pengolahan pencelupan (*dyeing*), penyempurnaan (*finishing*) dan pencapan (*printing*) menjadi kain jadi. Sifat dari industrinya semi padat modal, teknologi madya dan modern -

berkembang terus dan jumlah tenaga kerjanya lebih besar dari sektor industri hulu.

3. Sektor Industri Hilir (*downstream*), adalah industri manufaktur pakaian jadi (*garment*) termasuk proses *cutting*, *sewing*, *washing* dan *finishing* yang menghasilkan *ready-made garment*. Pada sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja sehingga sifat industrinya adalah padat karya (www.bps.go.id/...file/KBLI_2009_Cetakan_III diakses pada 29 Maret 2014).

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan metoda kualitatif yang dimulai dengan studi kepustakaan dari berbagai sumber informasi ilmiah, baik dalam bentuk buku, jurnal, media cetak seperti surat kabar, dan media elektronik seperti internet yang diharapkan dapat memberikan informasi yang terkini terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Hasil studi kepustakaan tersebut dipergunakan untuk menyusun suatu pedoman wawancara berupa materi pertanyaan yang akan diajukan kepada para narasumber dan informan yang berasal dari kepemerintahan maupun non pemerintah yang secara langsung terlibat dalam menyusun strategi strategi Indonesia dalam menghadapi dominasi produk tekstil China pasca ACFTA.

3.2.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh situs-situs resmi ASEAN, Departemen perindustrian, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), serta Industri atau Pabrik tekstil yang menjadi sampling dalam penelitian dan kemudian diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini membutuhkan cukup banyak pihak pihak yang terlibat dalam mencari pengaruh ACFTA terhadap industry tekstil Indonesia dan kemudian mengolah data-data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam. Penelitian ini didukung oleh teknik pengumpulan data seperti:

1. Studi Kepustakaan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaan teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Penelusuran data online. Peneliti dapat memanfaatkan data informasi berupa data maupun informasi teori, secepat dan semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs yang terkait dengan kebutuhan penelitian karena, objek

penelitian yang diamati merupakan suatu bentuk perjanjian internasional dan bukan berupa suatu badan atau lembaga.

3. Metode dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar.
4. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan informan yang dipakai peneliti adalah dengan menggunakan teknik penentuan *Purposive*. Yaitu peneliti menentukan pihak-pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian. Metode yang digunakan adalah metode wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penilitan ini, peneliti akan mengambil beberapa informan terpilih yang merupakan perwakilan dari:

1. Kementerian Perindustrian yang secara langsung memantau perkembangan industri dan produk tekstil Indonesia dan memiliki kewenangan untuk menyusun strategi yang akan diterapkan di seluruh industri pertekstilan Indonesia dalam menghadapi dominasi produk China pasca ACFTA.

2. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang mencatat data statistic penjualan produk tekstil baik ke pasar domestik maupun ekspor ke seluruh negara ASEAN dan China yang berasal dari industri – industri tekstil besar maupun kecil.
3. Sekretarian ASEAN di Indonesia yang memiliki data resmi mengenai ACFTA.
4. Departemen Bea Cukai, dimana produk tekstil yang masuk dari China didata dan diawasi langsung.
5. Pihak pihak non pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan kelangsungan industri tekstil Indonesia seperti Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang memiliki data tentang permasalahan yang dihadapi industri tekstil tanah air.
6. Pelaku bisnis yang terjun langsung memiliki atau memegang salah satu pabrik tekstil besar dan kecil di Indonesia.

3.2.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik data *display*. Dimana peneliti akan menyusun seluruh informasi yang di dapat dari studi pustaka maupun informan secara terstruktur sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dalam objek penelitian ini.

3.2.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat di bawah ini sesuai dengan kebutuhan peneliti, diantaranya :

a. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Jl. Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Selatan.

b. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Jl. M. Ridwan rais 115 Jakarta

c. Sekretariat ASEAN

JL. Sisingamaraja 70A Jakarta

d. Kedutaan Besar Republik Rakyat China

Jl. Mega Kuningan No.2. Jakarta Selatan

e. Asosiasi Pertekstilan Indonesia

JL. Gatot Subroto 49 Jakarta Selatan

3.3.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tujuh bulan terhitung dari Februari sampai Agustus 2014.

Tabel 3.4

Jadwal Penelitian Skripsi

NO	Kegiatan	Waktu Penelitian						
		2014						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Pengajuan Judul							
2	Pembuatan Usulan Penelitian							
3	Seminar Usulan Penelitian							
4	Bimbingan Skripsi							
5	Pengumpulan Data dan Analisis							
6	Sidang							